



Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal

Oleh:

Oki Rahadianto Sutopo

Abstrak

Artikel ini ingin menunjukkan relevansi pemikiran Peter.l Berger dalam Piramida Korban Manusia (1974) terutama mengenai konsep biaya-biaya manusia. Konsep ini coba dikontekstualisasikan dalam era neoliberal terutama pasca krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Bagi Berger, setiap keputusan politik ataupun model pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai etik yang bernama biaya-biaya manusia baik dalam hal fisik maupun makna. Nilai-nilai etik ini kelihatannya tidak menjadi prioritas utama dalam era neoliberal sekarang. Pengurangan subsidi, deregulasi dan privatisasi menjadi tiga kata ajaib untuk menciptakan pasar bebas. Ironisnya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan bagi tiga trinitas tidak suci antara lain WTO, IMF dan TNC/MNC sebagai aktor utama neoliberal. Realitas ini sekali lagi mengulangi apa yang terjadi pada era pembangunan sebelumnya. Dengan kata lain, lebih banyak lagi biaya-biaya manusia yang harus dikorbankan demi tujuan pasar

Kata kunci: neoliberal, dominasi, biaya-biaya manusia, makna

Abstract

This article wants to show the relevants of Peter.l Berger's thought in Pyramids of Sacrifice (1974) especially the human cost concept. This concept is contextualized in neoliberal era especially after the economic crisis 1998 in Indonesia. For Berger, every political decisions or development model has to consider the ethical values called human cost that included physical and meaning aspect. This ethical values do not seem become the main priority in neoliberal era. Reduction of subsidize, deregulation and privatization become three magic words to create what is called free market. Ironically, these policies just give benefit to the unholy trinity which are WTO, IMF and TNC/MNC as the main actors of neoliberal. This reality, once again repeat what happened in development era. In the other words, it creates more and more human cost for the sake of market goals

Keywords : neoliberal, domination, human cost, meaning

A. Pendahuluan

Sejak tahun '70an, negara-negara dunia ketiga dilanda oleh demam ideologi barat. Wacana mengenai pembangunan serta modernisasi menjadi wacana yang dominan. Kedua wacana tersebut merupakan alat dari negara barat khususnya Amerika untuk merebut hati negara-negara dunia ketiga serta untuk meredam pengaruh Uni Soviet. Dengan kata lain, pada dekade tersebut terjadi perang ideologi antara ideologi kapitalis yang termanifestasi dalam pembangunan dan modernisasi dengan ideologi sosialis-komunis. Indonesia semenjak jatuh pada rezim orde baru mulai membuka lebar pintu pembangunan khususnya terhadap penga-

ruh Amerika Serikat. Pembangunan yang pada hakekatnya baik jika disertai dengan nilai substantif berupa pemerataan dan keadilan sosial, oleh rezim orde baru hanya diartikan semata-mata untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan menghalalkan segala cara. Secara historis, pembangunan atau developmentalisme bergandengan dengan kapitalisme atau diistilahkan oleh Fakih (2003), developmentalisme merupakan bungkus baru dari kue lama kapitalisme. Sejak masa pembangunan, pemerintah Indonesia melalui perencanaan pembangunan menetapkan program pembangunan ke arah pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengadopsi Non-Communist Manifesto dari Rostow mengenai tahap-tahap perkembangan ekonomi dan trickle down effect-nya. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan masuknya investasi modal asing. Para perencana memprioritaskan pembuatan "kue" (pemupukan modal asing) terlebih dahulu daripada pembagian

kue secara merata (distribusi keadilan sosial). Dengan kue yang terbentuk terlebih dahulu maka menurut para perencana kue itu akan menetes ke bawah (trickle down effect) atau dalam rumusan yang lebih optimis pengaruh yang menyebar (spread effect) kepada masyarakat dan akhirnya akan terjadi pemerataan. Selain memakai teori di atas, pembangunan yang memakai model masyarakat barat mengandaikan bahwa segala sesuatu yang bersifat tradisional harus dimoderenkan, pembangunan adalah modernisasi dan modernisasi adalah westernisasi, sektor-sektor modern haruslah diutamakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tradisional dianggap sebagai penghambat kemajuan/pembangunan, transformasi menuju moderen mutlak dilakukan jika ingin mencapai standar hidup yang lebih baik.

Sosiolog Amerika, Peter.L.Berger melihat bahwa pembangunan yang dilandasi oleh ideologi kapitalis menyembunyikan mitos. Mitos didefinisikannya sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Dalam *Pyramids of Sacrifice* (1974), Berger menjelaskan bahwa model kapitalis menyembunyikan mitos pertumbuhan. Mitos tersebut sering digunakan dan selalu dicoba untuk direalisasikan dalam tindakan kolektif yang nyata serta menjanjikan suatu masa depan cerah yang harus dilunasi sekarang dengan korban-korban manusia. Namun janji-janji tersebut tidak ada jaminannya akan terwujud di masa depan. Menurut Berger (1974), mitos-mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya. Usaha demitologisasi terhadap mitos-mitos sangat diperlukan dan akan memberikan kemungkinan baru terhadap cara pandang serta pembuatan kebijaksanaan politik. Dalam *Pyramids of Sacrifice*

(1974) Berger mengingatkan bahwa yang terpenting bukanlah model pembangunan mana yang paling tepat, melainkan bagaimana pembangunan dapat dan harus menghilangkan penderitaan. Berger mengusulkan bahwa pembangunan seharusnya menyertakan nilai-nilai etik yaitu biaya-biaya manusia (*human costs*), baik dalam hal fisik maupun makna.

Di era sekarang, Indonesia berada dibawah dominasi raksasa neoliberalisme. Menurut Wibowo dan Wahono (2003), bibit-bibit dari neoliberalisme di Indonesia sudah mulai pada pertengahan '80-an, melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, dan pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Menurut Fakih (2003), globalisasi dan neoliberalisme adalah *mode of domination* yang ketiga setelah kolonialisme dan developmentalisme. Kepentingan di balik globalisasi yang sebenarnya adalah neoliberalisme, dimana mekanisme pasar bebas sangat dijunjung tinggi dan bahkan menjadi ideologi dengan mantranya *there is no alternative*. Intervensi, subsidi serta proteksi dari pemerintah dikurangi sebanyak mungkin supaya tidak mengganggu mekanisme pasar. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam agenda pokok paket kebijakan konsensus Washington yang menjadi menu dasar penyesuaian struktural IMF yang meliputi: 1) Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya 2) Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan 3) Pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan dan 4) pelaksanaan privatisasi BUMN (Bahagijo, 2006). Menurut Wibowo dan Wahono (2003), dari kacamata teori ketergantungan dapat dikatakan bahwa akibat dari neoliberalisme,

perekonomian negara-negara miskin cenderung menjadi wilayah-wilayah pinggiran bagi perekonomian negara-negara kaya, negara-negara miskin semakin tergantung kepada negara-negara kaya.

Hubungan antara globalisasi dengan neoliberalisme dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Aktor-aktor dari globalisasi ataupun neoliberalisme ini yaitu WTO, Bank Dunia/IMF dan Trans/Multinational Corporation (TNC), atau "The Unholy Trinity" menurut Nasikun (2005) memaksakan pada pemerintah untuk mengurangi proteksi, subsidi dan intervensi terhadap sektor perekonomian yang menjadi tempat hidup rakyat banyak, pasar domestik dibuka lebar-lebar untuk intervensi modal sehingga para kapitalis bebas masuk ke segala sektor perekonomian. Sedangkan Fakih (2003) dan Bahagijo (2006) menjelaskan bahwa ketiga aktor tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *intellectual property rights* dan kebijakan internasional. Selain itu, ketiga aktor mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi negara melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya untuk kelancaran proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses tersebut ditempuh dengan cara mengubah semua aturan kebijakan yang menghalangi ketiga aktor terutama TNC/MNC untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar maupun ekspansi investasi.

Berangkat dari uraian diatas, tulisan ini akan mengkontekstualisasikan pemikiran Peter.l Berger dalam *Pyramids of Sacrifice* (1974) mengenai perlunya mempertimbangkan aspek biaya-biaya manusia baik dalam hal fisik maupun makna dalam era neoliberal yang terjadi di Indonesia. Terlebih

dahulu akan diuraikan konteks masuknya neoliberal serta dominasi aktor neoliberal di Indonesia.

B. Pembahasan:

Era Neoliberal dan Dominasi IMF di Indonesia

Awal mula kebijakan yang lebih liberal di negara Indonesia terutama sejak tampuk kekuasaan berpindah ke rezim orde baru. Pada masa orde lama, kebijakan lebih dititikberatkan pada bidang politik dan cenderung berpihak pada blok komunis Uni Soviet. Semenjak jatuh ke tangan orde baru, untuk menangani inflasi tinggi peninggalan pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto mulai menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijak-

an ekonomi yang lebih liberal merupakan pengaruh dari ekonom-ekonom Indonesia yang oleh Malarangeng (2002) disebut sebagai jaringan epistemis liberal, atau oleh Ransom dalam Hadiz dan Dhakidae (2006) disebut sebagai mafia Berkeley.

Salah satu kebijakan utama pemerintah orde baru adalah penggabungan kembali ekonomi Indonesia dengan perekonomian global. Oleh orde baru, pembangunan difokuskan pada mengejar target pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan antara lain penanaman modal asing, kebijakan devisa, perdagangan luar negeri dan bantuan luar negeri. Indonesia lebih terintegrasi dengan ekonomi dunia setelah era boom minyak berakhir pada tahun 1982 (Mallarangeng; 2002). Pada tahun '80an inilah

benih-benih neoliberal telah dimulai, dengan kebijakan debirokratisasi dan deregulasinya. Setelah era boom minyak berakhir, pemerintah dihadapkan pada keharusan untuk mengembangkan industri yang efisien dan berdaya saing internasional sehingga dapat menghasilkan devisa, melalui suatu program penyesuaian struktural yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi yang lebih terbuka atau berorientasi keluar (*outward-looking economy*). Pemerintah juga menempuh kebijakan deregulasi dalam perdagangan luar negeri dan investasi termasuk penanaman modal asing yang bertujuan untuk mendorong sektor swasta termasuk swasta asing, lebih efisien dan berdaya saing tinggi (Wie; 2004).

Proses liberalisasi ekonomi terus terjadi di Indonesia dan mencapai puncaknya semenjak krisis ekonomi 1997.¹ Penarikan modal dalam jumlah besar membuat keadaan ekonomi Indonesia terguncang, terpuruknya ekonomi Indonesia yang diawali dengan depresiasi rupiah mengakibatkan sepanjang 1998 hampir semua sektor ekonomi, khususnya sektor konstruksi, industri manufaktur, keuangan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi, komunikasi dan jasa lainnya mengalami kontraksi tajam, sehingga PDB Indonesia pun berkontraksi hampir -14,0%, hingga akhirnya pemerintah meminta bantuan keuangan pada IMF (Wie; 2004). Indonesia harus mentaati resep-resep yang dianjurkan IMF dan Bank Dunia, untuk kasus Indonesia resep-resep ini disebut sebagai *letter of intent* yakni program-program yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan

¹ Krisis ekonomi di Asia Tenggara dimulai semenjak jatuhnya nilai mata uang Baht Thailand, hal ini berimbas pada negara-

negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia. Thee Kian Wie. 2004. Pembangunan, kebebasan dan mukjizat orde baru. Jakarta: Kompas. hal 123

perubahan ekonomi secara fundamental (Bahagijo; 2006). Resep-resep ini sebagaimana diungkapkan dalam agenda pokok paket kebijakan konsensus Washington menjadi

menu dasar penyesuaian struktural IMF. Dijelaskan oleh Hiariej (2004) bahwa pada tahun 1990, ekonom John Williamson memperkenalkan istilah Washington Consensus untuk merujuk pada tidak lebih dari sepuluh wilayah kebijakan neoliberal yang diterima dan diterapkan hampir seluruh pengambil kebijakan di seluruh dunia. Konsensus Washington tersebut meliputi:

1) Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara. Kebijakan anggaran konservatif, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang kepada kreditor dan lembaga keuangan internasional. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat banyak seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan untuk dihapus hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar cicilan utang luar negeri.

2) Pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan. Liberalisasi keuangan selain bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi dan transaksi global keuangan, juga dimaksudkan untuk menjamin agar modal dan dividen dapat keluar dari negara berkembang setiap saat. Kebijakan ini dimaksudkan juga untuk mempermudah integrasi pasar keuangan nasional ke dalam sistem global.

3) Pelaksanaan liberalisasi sektor industri dan perdagangan. Dimaksudkan untuk memudahkan negara-negara maju untuk mengeksport barang-barang produksinya ke negara berkembang. Sementara negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui mekanisme kuota, *export retrain*, subsidi dan hambatan non tarif.

4) Pelaksanaan privatisasi BUMN. Penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara dalam ekonomi berkurang sampai sekecil mungkin, untuk digantikan oleh swasta terutama swasta asing. Dalam prakteknya penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (*piratization*).²

Luasnya persyaratan yang ditetapkan IMF berarti negara-negara yang menerima bantuan tersebut harus rela melepaskan sebagian besar kedaulatan ekonomi yang dimiliki (Stiglitz; 2006). Keterlibatan IMF justru membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin parah dan mendalam, salah obat dan salah diagnosis membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1997 menurun hingga -13%. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi memang tetap akan terjadi di Indonesia, namun skalanya relatif kecil. Namun keterlibatan IMF mengakibatkan ekonomi Indonesia merosot hingga -12,8% pada 1998. Biaya sosial ekonomi dari krisis adalah kerusuhan sosial Mei 1998, peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitulasi bank lebih dari Rp 600 triliun serta tambahan beban utang puluhan miliar dolar yang

² International Monetary Fund (IMF). A. Tony Prasetyantono dalam I.Wibowo dan F.Wahono, (ed). 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas. hal: 119-121.

masih terasa sampai sekarang.³ Bahkan Stiglitz (2006) menjelaskan bahwa ada satu hal yang membuatnya gusar saat pindah jabatan dari Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden menjadi Kepala Ekonom Bank Dunia, yaitu sikap IMF dan Departemen Keuangan AS. Di luar negeri, IMF seringkali mendesak kebijakan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang kami perjuangkan di dalam negeri, sebagaimana dijelaskan: *"Di dalam negeri, kami berjuang menentang privatisasi jaminan sosial, namun di luar negeri kita menggencarkannya"*.

Stiglitz (2006) mengkritik konsensus Washington terutama jika diterapkan di negara – negara yang berhutang, termasuk Indonesia. Stiglitz mengakui bahwa sebagian besar negara-negara yang telah melakukan penyesuaian struktural terutama negara-negara yang sedang melakukan transisi seperti Eropa Timur dan bekas Uni Soviet gagal dalam mengurangi kemiskinan, hutang luar negeri dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Bahkan Michael Chossudovsky dalam Stiglitz (2002) menyalahkan IMF dan WTO sebagai penyebab kemiskinan, eksploitasi dan perang di negara-negara Eropa Timur yang menjalankan kebijakan neoliberal.⁴

C. Dominasi World Trade Organization (WTO)

Selain dominasi IMF, WTO juga menjadi salah satu aktor yang turut melanggengkan neoliberalisme di Indonesia. Secara historis, WTO didirikan pada 1 Januari 1995, organisasi ini merupakan kelanjutan dari general agreement on tariffs and trade (GATT). Sebelum berubah menjadi WTO, GATT hanya mengurus masalah perdagangan barang

antarnegara. Namun setelah WTO lahir, masalah yang diurus semakin meluas yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa dan HAKI (Hak kekayaan intelektual) terkait perdagangan. Memakai terminologi Weber mengenai *ideal type*, WTO dipercaya akan membantu menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas dan adil, dengan semboyannya yaitu *"semakin bebas perdagangan, semakin besar arus laba, baik bagi negara maupun para pelaku perdagangan, maka masyarakat dunia akan semakin sejahtera."* Namun hal itu hanyalah merupakan tipe ideal, kenyataan empirisnya sungguh sangat berbeda.

Pasca putaran Uruguay, perusahaan multinasional di negara maju gencar melobi untuk mendorong liberalisasi di luar perdagangan barang, yaitu jasa dan investasi serta dorongan untuk pemberlakuan HAKI. Sejak saat itu perundingan perdagangan internasional lebih condong ke arah kepentingan negara-negara maju. Dijelaskan oleh Jhamtani (2005) bahwa paling tidak terdapat lima masalah yang dihadapi negara berkembang berkaitan dengan WTO antara lain: 1) Struktur sistem dan perjanjian WTO tidak adil terhadap kepentingan negara berkembang,

2)Keuntungan yang diharapkan oleh negara berkembang ketika bergabung dengan WTO ternyata tidak terealisasi,

3)Negara berkembang terus ditekan serta

4)Proses pengambilan keputusan di WTO tidak transparan dan tidak adil.

³ Pengalaman buruk Indonesia di bawah IMF. Rizal Ramli (pengantar).2006. dalam Sugeng Bahagijo (ed) Globalisasi menghempas Indonesia. Jakarta; LP3ES. hal v

⁴ Cahyo Pamungkas. Indonesia dan Integrasi ekonomi global. Jurnal Pesantren Ciganjur edisi 04/Th.II/2007. hal 80.

Dalam kenyataan empiris, kesepakatan mengenai perdagangan internasional bukanlah suatu kompromi perdagangan melainkan suatu proses politik. Negara harus menjalankan kewajiban di bawah WTO, tetapi yang menikmati hasilnya adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Demi kepentingan perusahaan multinasional ini, pemerintah dipaksa bekerja keras merundingkan peraturan global yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak (Jhamtani; 2005).

Lalu bagaimana dengan keterlibatan Indonesia dalam WTO? Bagaimana dampak keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO tersebut? Indonesia ternyata telah bergabung dengan organisasi tersebut sejak tahun '50an. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa WTO bukannya menciptakan keuntungan bagi Indonesia namun justru menjerumuskan Indonesia ke dalam bencana besar. Organisasi inilah yang menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana dijelaskan Appadurai dalam Ritzer (2003) bahwa pertumbuhan institusi dan organisasi transnasional banyak menghilangkan kekuasaan negara bangsa. Agenda besar WTO tentu saja tidak lepas dari peran IMF dan Bank dunia yang sama-sama memaksakan liberalisasi perdagangan kepada negara-negara pengutangnya (Jhamtani; 2005).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa WTO tidak hanya mengurus masalah perdagangan barang saja namun telah mengalami perluasan antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan (trade related intellectual property right). Dampak

yang dialami oleh Indonesia juga terkait dengan tiga hal tersebut, sebagai contoh yaitu liberalisasi perdagangan yang dimulai pada sektor pertanian. Sejak 1997, diterapkan liberalisasi pangan dan penyingkiran BULOG, liberalisasi pupuk lewat penyingkiran PUSRI, dan penghapusan tarif bea masuk pertanian hingga 0%.⁵ Dengan kebijakan ini maka petani kecil akan bersaing dengan perusahaan multinasional, lalu siapa yang akan menang? Selain itu liberalisasi juga melanda pada sektor jasa (pendidikan, kesehatan, air, listrik dll), sebagai contoh yaitu terjadinya privatisasi pendidikan (biaya pendidikan semakin mahal), penjualan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak, privatisasi rumah sakit dll. Tidak cukup hanya di situ saja, WTO dengan kebijakannya mengenai HAKI, maka perusahaan transnasional berhak mematenkan apa yang diklaim merupakan penemuan mereka. Salah satu contohnya adalah dengan diterapkannya oleh DPR, UU no 15/2000 tentang paten, UU no 29/2000 tentang varietas tanaman dan UU no 31/2000 tentang desain industri⁶ akan merugikan kaum petani serta para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

D. Dominasi Perusahaan Trans/Multinasional (TNC/MNC)

"Kita hidup dalam dunia yang tengah diambil alih secara diam-diam (Silent take over)"

(Hertz; 2005)

Kutipan pernyataan dari Noreena Hertz di atas merupakan suatu cerminan kenyataan yang telah

⁵ Setiawan, Bonnie. 2003. "Antara Doha dan Cancun" dalam F Wahono dan I Wibowo (ed), *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cinderalas. Hal.66.

⁶ Ibid.

terjadi sekarang, sungguh sesuatu yang ironis karena ternyata telah terjadi perubahan yang besar namun kita tidak mengetahuinya sama sekali. Lalu siapa yang telah mengambil alih kehidupan kita secara diam-diam? Salah satunya adalah dari "the unholy trinity" yaitu perusahaan trans/multinasional (TNC/MNC). Sebagaimana dijelaskan Theodore Lewi dalam Rianto (2004) menyebut era sekarang sebagai *a corporate millenium* yang diinterpretasikan ke dalam model hegemoni swasta dan pasar bebas. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat bertindak sebagai aktor kunci dalam ekonomi global, karena mampu melakukan integrasi secara vertikal, konsentrasi modal, organisasi pasar, manajemen dalam suatu skala yang dapat membuatnya menginternasional, ke arah ekonomi global dan kemudian memenuhi permintaan-permintaan akan pasar global.⁷

Dominasi dari TNC/MNC dapat dilihat dari perkembangan jumlahnya yang semakin meningkat, pada tahun 1970 jumlah mereka sekitar 7000 TNC namun pada tahun 1990 jumlah mereka mengalami peningkatan menjadi 37.000 TNC (Fakih; 2003) Jumlah mereka yang semakin banyak menurut Rianto (2004) dikarenakan perusahaan-perusahaan melakukan merger, tidak hanya antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar namun juga antar perusahaan besar, sehingga mereka mendominasi hampir 75% dari total investasi global atau dengan kata lain 75% perdagangan dunia.

Lebih lanjut Fakih (2003) menjelaskan bahwa TNC/MNC merupakan aktor yang berkuasa dan justru lebih penting setelah WTO. Dijelaskannya

bahwa TNC/MNC lah yang berada di balik semua proses kesepakatan dalam WTO. TNC/MNC sangat berkepentingan melalui mekanisme globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar yang mengatur mekanisme dari semua sistem produksi dan pasar tersebut ditetapkan di WTO. Dominasi TNC/MNC semakin meluas pada sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak hanya sektor ekonomi

namun juga sektor jasa. Nugroho (2004) menjelaskan bahwa jika perekonomian dikuasai oleh swasta, maka pengelolaan dan penyediaan akses ke setiap sumber daya publik adalah bisnis dan setiap warga masyarakat adalah konsumen. Sedangkan Priyono dalam Wibowo dan Wahono

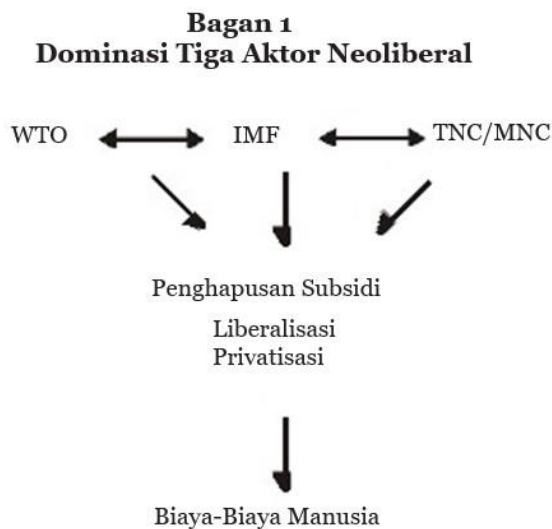
(2003) melihat kenyataan yang terjadi sebagai marginalisasi ala neoliberalisme, sebagaimana dikatakannya; "*Bila anda tidak mampu membeli, anda tidak berhak mendapatkan kebutuhan yang bahkan paling mendasar untuk hidup*"

Dominasi dari TNC/MNC saling jalin-menjalin dengan dua aktor neoliberal yang lain yaitu WTO dan IMF. IMF dengan perangkap hutangnya memaksa negara-negara pengutang termasuk Indonesia untuk melakukan liberalisasi di berbagai sektor, dimana liberalisasi merupakan

kepentingan dari organisasi WTO dan ironisnya yang ada dibalik WTO adalah perusahaan trans/multinasional (TNC/MNC) sebagaimana dijelaskan Fakih (2003). Ketiga aktor ini pada akhirnya hanya menimbulkan biaya-biaya manusiawi yang lebih besar, terutama rakyat kecil.

⁷ Puji Rianto, 2004. "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi, dan Krisis Demokrasi. *Jurnal Sosial Politik (JSP) UGM Vol.4 No. 2.*

Dibawah ini dalam bagan dijelaskan mengenai dominasi tiga aktor neoliberal:



E. Mempertimbangkan Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal

Penjelasan mengenai peran tiga aktor neoliberal yaitu IMF, WTO dan TNC/ MNC dalam menjalankan kepentingan untuk meliberalisasi pasar dan menguasai segala aspek kehidupan menunjukkan bahwa semuanya dilakukan untuk tujuan pemupukan profit. Pasar bebas dipercaya secara membabi buta akan mendatangkan kemakmuran bagi semua orang. Pengebirian peran negara sebagai pelindung rakyat dipercaya akan memperlancar terciptanya pasar bebas. Globalisasi dan neoliberalisme telah menjadi sebuah mitos dengan mantranya "There is no alternative". Akan tetapi benarkah demikian? Disinilah kiranya kita perlu mempertimbangkan ide-ide Peter L. Berger dalam

Pyramids of Sacrifice (1974). Mitos mengenai neoliberalisme harus dibongkar kepalsuannya,⁸ usulan terhadap pembongkaran mitos juga senada dengan pendapat dari Bourdieu (2003) dikatakannya bahwa: "Neoliberalisme ibarat Marxisme di masa lampau dalam hal membangkitkan mitos mengenai utopia free trade faith, oleh karena itu harus dibongkar kepalsuannya"⁹

Mitos bahwa kebijakan neoliberal akan mendatangkan kemakmuran bagi semua orang harus dibongkar kepalsuannya. Karl Polanyi dalam Ritzer (2003) mengatakan bahwa "Jika ekonomi pasar dibiarkan berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri maka akan menciptakan keburukan-keburukan yang dahsyat". Apa yang diramalkan Polanyi mendapat pembuktian pada jaman sekarang dimana yang terjadi bukanlah kemakmuran bagi

semua orang melainkan kemakmuran bagi negara-negara maju, kemakmuran bagi segelintir orang yang mempunyai modal besar dan kemakmuran bagi perusahaan trans/multinasional. Memakai pisau analisis dari Wallerstein dalam Ritzer (2003) mengenai modern world system dimana dibedakan antara negara inti (core), negara semi pinggiran (semi-periphery) dan negara pinggiran (periphery), maka kemakmuran lebih banyak dinikmati dan menumpuk di negara-negara pusat (core) atau meminjam istilah Connell (2007) hanya northern countries yang mendapat keuntungan lebih besar.

⁸ Dalam Pyramids of Sacrifice(1974), Berger mengusulkan pembongkaran terhadap mitos kapitalisme dan sosialisme. Sebagaimana dikatakan dalam tesisnya yang kedua (2) bahwa: "Model-model ideologis yang utama mengenai perubahan sosial didasari oleh dua mitos yang dominan-mitos pertumbuhan dan mitos revolusi" Kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya.

Selain itu pada tesisnya yang keempat dan kedelapan dijelaskan bahwa: Ideologi kapitalis, yang didasarkan pada mitos pertumbuhan, harus dibongkar kepalsuan- kepalsuannya" dan juga "Ideologi sosialis yang didasarkan pada mitos revolusi, harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya"
⁹ Sebagaimana dikutip dalam majalah Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu, 2003.

Mitos kesejahteraan bagi setiap orang yang dijanjikan oleh neoliberalisme dalam kenyataannya yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang semakin tajam.

Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2004) bahwa antara 1960 dan 1997 selisih pendapatan antara seperlima penduduk paling miskin dan paling kaya di dunia ini telah berlipat lebih dari dua kali. Pada akhir 1990, seperlima penduduk yang paling kaya itu menguasai 86% kemakmuran dunia, sementara seperlima yang paling miskin hanya mengais-ngais 1 % saja. Dan keadaan itu menjadi lebih buruk lagi, sekarang seperlima penduduk yang paling kaya menguasai 88 % dan seperlima penduduk yang miskin menguasai hanya 0,85 % saja.¹⁰ Fenomena kesenjangan sosial tersebut apabila dibaca dengan perspektif dari Beck mengenai masyarakat resiko dalam *Risk Society; Toward a New Modernity* (1992), maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin menanggung resiko terbesar (baik resiko kemiskinan, kerusakan lingkungan, penyakit dll) dari dampak neoliberal. Sebagaimana dijelaskan oleh Beck dalam Ritzer (2003) bahwa:

“Sejarah distribusi resiko menunjukkan bahwa, seperti kekayaan, resiko melekat pada pola pembagian kelas, hanya saja secara terbalik: kekayaan terakumulasi di puncak (kelas atas) sedangkan resiko terakumulasi di dasar (kelas bawah). Hingga taraf tertentu resiko ternyata tidak menghapus tetapi justru memperkuat masyarakat berkelas. Kemiskinan menghimpun resiko yang berlimpah. Sebaliknya kekayaan dapat membeli keselamatan dan kebebasan dari resiko”

Selain perlunya melakukan pembongkaran mitos, usulan dari Berger bahwa berbagai kebijakan yang membenarkan kesengsaraan dan penderitaan hari ini untuk tujuan kemakmuran dan ketentraman masa depan yang sulit dibuktikan kebenarannya secara empiris tidak dapat dibenarkan secara moral, sangat sesuai jika diterapkan dalam era neoliberal sekarang. Kesengsaraan dan penderitaan rakyat kecil demi suatu mitos tentang pasar bebas tidak dapat dibenarkan secara moral. Seharusnya yang diprioritaskan bukan kepentingan ekonomi untuk menumpuk profit, melainkan harus mempertimbangkan biaya-biaya manusia (*human cost*). Usulan Berger merupakan suatu perwujudan dari apa yang dianut Berger sebagai etika tanggung-jawab, sebuah prinsip yang merupakan hasil pengaruh Max Weber. Menurut Berger dan Kellner dalam *Sociology Reinterpreted* (1981), etika tanggung jawab adalah etika yang mengambil kriteria tindakannya dari perhitungan atas akibat yang mungkin timbul dan bukan dari prinsip-prinsip mutlak. Ini artinya bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu mempertimbangkan antara kemungkinan hasil dan kemungkinan biaya. Perlunya mempertimbangkan biaya-biaya manusia dijelaskan Berger dalam tesisnya yang ke tujuh belas(17):

”Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

¹⁰ Nugroho, Yanuar. 2004. *Soal Keadilan antar Bangsa di Masa Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Kompas. Hal. 88.

Usulan Berger mengenai perlunya memperhatikan biaya-biaya manusia (human cost) seharusnya senantiasa diterapkan dalam era neoliberal sekarang, apabila dalam era neoliberal yang dikejar hanya kepentingan ekonomi untuk menumpuk profit dengan menghalalkan segala cara, maka dampaknya seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit, hanya akan menghasilkan korban-korban manusia yang lebih banyak lagi. Kenyataan ini merupakan bencana besar bagi kehidupan mayoritas umat manusia.

Dalam hal makna, biaya-biaya manusia akibat dari neoliberalisme juga tidak kalah memprihatinkan. Dominasi dari tiga aktor neoliberal membuat individu kehilangan kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri dikarenakan hampir semua sektor telah dikuasai. Partisipasi individu untuk menentukan nasibnya hampir tidak ada. Penguasaan terhadap segala aspek kehidupan membuat individu tidak dapat menemukan makna. Definisi makna juga telah diatur oleh kepentingan pasar, hal ini menurut Berger (1974) membuat individu berada dalam keadaan homeless (ketidakberumahan). Sebagaimana dijelaskan dalam tesisnya kesembilan belas (19) :

"Manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna. Suatu penilaian atas biaya-biaya dalam kebijaksanaan politik harus juga merangkum suatu perhitungan makna"

Kebutuhan akan makna merupakan hal esensial bagi manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Berger bahwa "manusia tidak cukup hanya hidup dengan roti". Kebutuhan akan makna juga dijelaskan Berger dalam karya-karya sebelumnya antara lain Invitation to Sociology (1963), The Social

Construction of Reality (1966), The Social Reality of Religion (1973) dan

Homeless Mind (1973). Setiap dunia yang bermakna, menyediakan bagi penghuninya suatu perlindungan terhadap anomie, adanya makna dibaratkan sebagai sebuah tempat yang aman tenteram diantara dunia yang kacau balau sekarang ini. Oleh karena itu manusia berhak atas suatu dunia yang bermakna (Berger and Luckman; 1966).

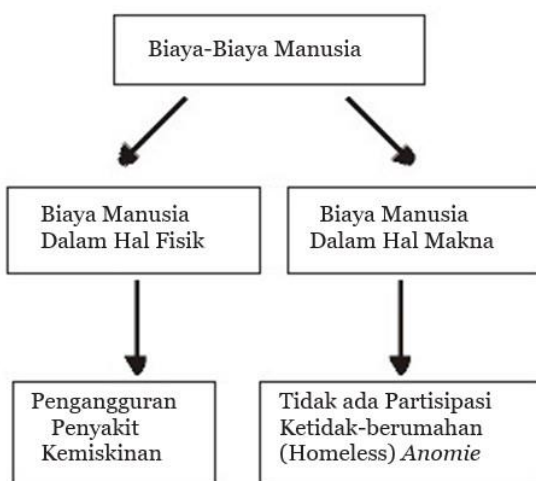
WTO dengan peraturan-peraturannya, IMF dengan jerat hutangnya dan TNC/MNC dengan dominasi ekonomi dan teknologi sama sekali tidak memperdulikan "suara" individu dikarenakan hampir semua sektor kehidupan hanya dinilai dengan uang. Memakai terminologi Weber dalam Coser (1971), rasionalitas substantif telah digantikan oleh rasionalitas instrumental, dunia telah kehilangan pesonanya dan individu serasa hidup dalam sangkar besi

(Iron cage of rationality). Lebih lanjut, Amartya Sen dalam Development as Freedom (1992) menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kebebasan, dalam arti bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, teror dll. Namun kepentingan pasar telah membuat individu kehilangan kebebasannya, yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang semakin lebar. Bahkan Hertz (2005) menjelaskan bahwa dalam era neoliberal demokrasi telah mati, ini berarti suara individu tidak lagi diperhatikan, hal tersebut menunjukkan bahwa definisi situasi individu juga tidak diperhatikan. Imperatif dari Berger (1974) bahwa seharusnya definisi situasi individu diperhatikan supaya individu dapat berpartisipasi dalam menentukan kehidupannya

dan untuk menemukan makna kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Berger (1974) dalam tesisnya yang kelima belas: "Mereka yang merupakan sasaran kebijaksanaan politik harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam merumuskan definisi-definisi situasi. yang merupakan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan tadi. Partisipasi ini bisa disebut partisipasi kognitif."

Apabila partisipasi individu tidak dihiraukan atau dengan kata lain didominasi oleh kepentingan pasar maka dalam tingkatan kronis, individu akan mengalami suatu keadaan yang digambarkan oleh Berger sebagai anomie. Secara ringkas biaya-biaya manusia dalam era neoliberal dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 2
Biaya-Biaya Manusia Dalam Era Neoliberal



F. Penutup

Globalisasi dan neoliberalisme bukanlah suatu hal yang terjadi secara alami, namun merupakan narasi

besar, sebuah konstruksi sosial yang berusaha diwujudkan untuk sebuah motif, tidak lain adalah nafsu untuk menguasai (Will to power). Dengan kedok bahwa penyerahan sepenuhnya pada mekanisme pasar akan dapat menyejahterakan rakyat serta penyatuan menjadi satu sistem ekonomi global akan menyejahterakan seluruh bangsa, wacana globalisasi dan neoliberalisme terus berjalan hingga saat ini. Ada satu hal yang tidak mendapatkan prioritas dalam wacana neoliberalisme yaitu mengenai biaya-biaya manusia (human cost). Globalisasi di satu sisi mendatangkan manfaat tapi di sisi yang lain mendatangkan korban. Dimensi korban inilah yang seharusnya tidak boleh kita lupakan dalam perdebatan wacana mengenai globalisasi dan neoliberalisme.

Human cost merupakan suatu kriteria mutlak yang harus selalu mendapat prioritas dalam segala bidang. Kenyataan yang terjadi sekarang tidak memberikan banyak tempat untuk pertimbangan etika mengenai kalkulasi biaya-biaya manusia. Kepentingan pasar mendominasi dalam segala hal. Ini berarti manusia telah melupakan hakikat dasar bahwa kegiatan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat namun sebaliknya kegiatan perekonomian sekarang ditujukan untuk memenuhi kegiatan ekonomi itu sendiri. Mengejar profit, mengejar angka-angka pertumbuhan serta tingkat investasi menjadi kosakata yang dominan. Kesejahteraan manusia dan keadilan sosial telah dikorbankan demi cita-cita pasar bebas. Seharusnya faktor biaya-biaya manusia mendapatkan prioritas diatas kepentingan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Berger (1974) adalah suatu imperatif bahwa biaya-biaya manusia harus didahulukan. Seharusnya kehidupan manusia tidak

begitu saja dikorbankan demi kepentingan-kepentingan pasar.

Dominasi pasar di segala aspek kehidupan manusia membuat individu kehilangan akan makna kehidupan. Meskipun makna merupakan hal yang subyektif, namun setiap individu pasti membutuhkan keberadaan makna untuk melanjutkan kehidupannya. Makna merupakan cerminan dari sisi humanis manusia yang membedakan mereka dengan makhluk hidup yang lain. Sebuah imperatif bahwa kepentingan pasar seharusnya tidak membuat individu kehilangan makna kehidupan, kehilangan makna berarti berada dalam kondisi anomie bagi individu. Lalu apakah artinya kekayaan yang berlimpah jika manusia berada dalam kondisi anomie? Keberadaan makna sangat penting, tanpa makna manusia tidak dapat hidup di dunia.

Ada beberapa agenda kedepan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah pengembalian fungsi negara sebagai institusi yang memberikan pelayanan sosial kepada warga negara, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat pokok (basic needs). Keberadaan *social services* terhadap warga negara diperlukan terutama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Agenda selanjutnya adalah demokratisasi di berbagai bidang, terutama penekanan pada nilai-nilai substantif. Dengan terwujudnya demokrasi substantif maka suara rakyat akan lebih diperhatikan dan rakyat bebas memilih apa yang diinginkannya, hal tersebut akan membuat rakyat dapat meraih makna dalam kehidupannya. Agenda lain yang tidak kalah penting adalah perlunya memperhatikan isu-isu hak-hak asasi

manusia (HAM), tidak hanya dalam hal politik, namun juga hak asasi manusia

dalam hal ekonomi, sosial dan budaya. Dengan menjunjung tinggi penghargaan terhadap HAM diharapkan pada masa mendatang semakin berkurang korban-korban manusia dan pada tingkat yang utopis, tidak ada lagi biaya-biaya manusia yang harus dikorbankan.

Daftar Pustaka

- Bahagijo, Sugeng. 2006. *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter I. 1963. *Invitation to Sociology*. New York: Basic Books.
- _____. 1973. *The Social Reality of Religion*. England: Penguin Books.
- _____. 1974. *Pyramids of Sacrifice*. England: Penguin Books.
- Berger, Peter.I and Thomas Luckman. 1966. *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Books.
- Berger, Peter.I and Hanfried Kellner. 1981. *Sociology Reintepreted*. New York : Basic Books.
- Berger, Peter.I and Samuel.P.Huntington (eds).2002. *Many Globalizations. Cultural Diversity in The Contemporary World*. New York: Oxford University Press
- Connell, Raewyn. 2007. "The Northern Theory of Globalization." *Sociological Theory, Vol. 25, No. 4*. USA : American Sociological Association.
- Coser, Lewis. 1971. *Masters of Sociological Thoughts*. New York: Jovanovic Inc.
- Dhakidae, Daniel dan Vedi Hadiz (ed). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heertz, Noreena. 2005. *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*. Yogyakarta: Alenia.
- Hiariej, Eric. 2005. *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto*. Yogyakarta: IRE Press.
- Mallarangeng, Rizal. 2004. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992*. Jakarta: KPG dan Freedom Institute.
- Nasikun .2005. *Peran Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberalisasi dan Humanisasi*

Teknologi. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Nugroho, Heru. 2001. *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2003. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Yanuar. 2004. *Soal Keadilan antar Bangsa di Masa Neoliberalisme*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Jhamtani, Hira. 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press.

Pamungkas, Cahyo. "Indonesia dan Integrasi Ekonomi Global." *Jurnal Pesantren Ciganjur edisi 04/Th.II/2007*

Prasetyantoko, A. 2004. *Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Rianto, Puji. 2004. "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi, dan Krisis Demokrasi." *Jurnal Sosial Politik (JSP) UGM Vol.4 No. 2*.

Ritzer, George. 2003. *Modern Sociological Theory*. USA: McGrawhill.

Sen, Amartya. 1992. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.

Setiawan, Bonnie. 2003. "Antara Doha dan Cancun" dalam F Wahono dan I Wibowo (ed), *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cinderalas

Stiglitz, Joseph. 2006. *Dekade Keserakahan Era 90an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*. Tangerang: Marjin Kiri. 2006.

Thee Kian Wie. 2004. *Pembangunan, Kebebasan dan Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Wibowo, I dan F Wahono. 2003. *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelas.

Majalah:

Edisi khusus Pierre Bourdieu. 2003. *Majalah Basis*. Yogyakarta: Yayasan BP Basis